

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Setiap wilayah membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, atau juga disebut tata kelola yang baik. Laporan keuangan yang berkualitas tinggi membutuhkan standar manajemen keuangan daerah selama tahap penganggaran, implementasi, dan penanggungjawaban. Untuk membuat pengelolaan keuangan akuntabel kepada publik, laporan keuangan sangat penting. Manajemen lembaga pemerintah harus memberikan informasi kepada publik karena peningkatan kebutuhan akan akuntabilitas publik, antara lain adalah data dari laporan keuangan (Mardiasmo, 2007) dalam (Azlan, Herwanti, & Pituringsih, 2015).

Menurut peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memenuhi kriteria berikut : relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Pemerintah daerah harus menyusun laporan keuangan yang baik. Laporan keuangan pemerintah daerah yang baik menunjukkan seberapa baik pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup seberapa baik administrasi dan taat asas. Opini Wajar Tanpa Pengecualian Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah bahwa laporan tersebut berkualitas tinggi (Adhi dan Suhardjo, 2013).

Pelaporan keuangan dibuat untuk menunjukkan posisi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama periode pelaporan. Laporan keuangan sangat penting karena dapat digunakan untuk mengetahui kondisi baik atau buruknya kinerja suatu perusahaan atau organisasi. Untuk mendapatkan

informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan (Faradisa, Khafid dkk, 2017). Pada periode pelaporan kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antar generasi (*unternational equity*). Setiap entitas pelaporan harus secara sistematis melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan (SAP Nomor 24 Tahun 2005). Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah didasarkan pada bagaimana unit akuntansi pemerintah daerah menemukan, mengukur, dan mencatat transaksi ekonomi (keuangan). Transaksi-transaksi ini digunakan untuk sebagai informasi dalam penanggungjawaban pengelolaan keuangan suatu lembaga entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak membutuhkan. (Erlina, et., 2015).

Untuk mewujudkan aspirasi dari masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita mereka adalah dengan adanya pemerintahan yang baik itu sangat penting. Untuk tercapainya tata kelola keuangan yang baik, seseorang harus dapat menerapkan lima prinsip tata kelola pemerintahan yang kuat yaitu : keadilan, akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi, dan independensi (Burak et al., 2017). Hal ini sesuai dengan instruksi presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah (AKIP) yang menetapkan bahwa sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah dapat dilakukan dengan benar.

Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas untuk membangun pemerintahan yang baik diikuti dengan sumber daya aparatur yang kompeten. Namun sudah menjadi masalah umum di lembaga pemerintahan daerah bahwa untuk penataan personil, sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan kuantitas dan

kualitas. Dari aspek kualitas penataan personil tidak mengikuti prinsip “*the right man on the right place*” (Fikri dkk, 2015). Hal ini sangat relevan karena untuk pengembangan organisasi yang hanya mempertimbangkan kualitas sumber daya aparatur yang ada, yang belum memenuhi kompetensi yang seharusnya dipenuhi (Aruan, 2003). Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah secara terbuka adalah salah satu cara pengelolaan keuangan untuk membantu pembangunan daerah dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya untuk menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah secara jujur dan non teknis.

Selain itu, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) juga menekankan pentingnya profesi akuntan Indonesia secara keseluruhan. Standar akuntansi pemerintahan (SAP) erat terkait dengan kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Adanya sistem dan peraturan institusional yang mendukung penciptaan laporan keuangan berkualitas tinggi merupakan bagian penting dari pengelolaan yang efektif. Laporan keuangan yang berkualitas dibuat untuk menunjukkan laba dan rugi serta posisi utang, harta dan modal perusahaan (Fransiska et al., 2016).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan beberapa alasan mengapa tidak sepenuhnya mempercayai pelaporan keuangan pemerintah daerah, termasuk sistem pengendalian internal yang lemah dan peraturan negara bagian dan daerah yang longgar tentang *real estate*, produk, dan layanan. Oleh karena itu laporan keuangan harus dibuat dengan baik oleh pengelola keuangan. Pemerintah daerah

harus memberikan informasi didalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

Fenomena menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara terus menerus di pemerintah kabupaten Kudus. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, BPK RI menyatakan dengan 4 (empat) opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten Kudus mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Kudus tahun anggaran 2018-2022. Adanya tuntutan dari masyarakat untuk pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilihat ikhtisar dari pemeriksaan Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah kabupaten Kudus 2018-2022.

**Tabel 1.1**  
**Opini BPK atas Laporan Keuangan**  
**Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**

No	Entitas Pemerintah Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kabupaten Kudus	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)

Pemerintah kabupaten Kudus meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Penerapan Wajar Tanpa Pengecualian yang didasari penilaian auditor Badan Pemeriksaan Keuangan sebagai standar daerah dalam memperoleh persetujuan anggaran. Hal ini

dikarenakan salah satu tujuan yang ingin diraih kabupaten Kudus. Dengan mendapatkan opini tersebut diharapkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di kabupaten Kudus akan lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada publik. Ada beberapa faktor yang dapat diperlukan untuk menciptakan laporan keuangan yang baik yaitu diperlukan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi aparatur pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, kapasitas sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal yang memadai.

Faktor yang pertama mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah sangat penting karena fungsinya untuk menentukan kualitas laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi mengenai kinerja keuangan secara menyeluruh. Sistem akuntansi keuangan memberikan informasi keuangan yang lengkap, teliti, dan akurat sehingga mereka dapat menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai dasar mengevaluasi pelaksanaan keuangan mereka. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziah (2019),

Faktor yang kedua adalah kompetensi aparatur pemerintah yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka secara efektif dan efisien sesuai dengan standar yang ditetapkan. Keberhasilan suatu organisasi bergantung pada kompetensi aparatur yang berada dalam organisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan yang baik agar aparatur pengelolaan pemerintah dapat

berkualitas yang tinggi dan memberikan kontribusi yang maksimal bahwa aparatur adalah penggerak apapun yang dilakukan negara dengan tujuan memakmurkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan baik. Penelitian Fauziyah (2019) menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi informasi yang sangat pesat serta potensi pemanfaatannya yang secara luas, maka dapat membuka adanya peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Persepsi tentang kemudahan menggunakan teknologi informasi akan mempengaruhi kemampuan individu yang menggunakan teknologi informasi. Penelitian Nurul dkk., (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah (2019) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor yang ke empat adalah kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kapasitas sumber daya manusia yang tinggi akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik dan kemudian menggunakan pengetahuan dan pemahamannya dalam menyusun laporan keuangan. Semakin tinggi kapasitas sumber daya manusia maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah maka akan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan yang membuat keputusan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh

Redian, (2019) menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berdampak positif pada kualitas laporan keuangan.

Faktor yang terakhir sistem pengendalian internal berfungsi sebagai variabel moderasi. Sistem pengendalian internal adalah suatu proses untuk mengukur kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atas tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008). Sementara itu, sistem pengendalian internal yang dapat digunakan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan sangat luas dilingkungan. (Nilam Sari, 2016). Penelitian ini yang dilakukan oleh Fauziyah (2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal dapat memoderasi sistem akuntansi keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fauziyah (2019) yang meneliti bagaimana pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi aparatur pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi. Namun terdapat perbedaan di penelitian sebelumnya. Perbedaan yang pertama adalah penambahan satu variabel independen yaitu kapasitas sumber daya manusia, dalam penelitian ini yang didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Redian, (2019) dan NA Ridzar dkk., (2018). Kapasitas sumber daya manusia yang diprediksi mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam laporan keuangan. Alasan penambahan variabel kapasitas sumber daya manusia dalam penelitian ini karena

terdapat kesimpulan menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap sistem pengendalian internal pada kualitas laporan keuangan. Sumber daya manusia kualitasnya tinggi dan laporan keuangannya tinggi yang dapat berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Perbedaan yang kedua adalah lokasi objek dari penelitian, di penelitian Fauziyah (2019) menggunakan organisasi perangkat daerah di kota Serang sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian ini menggunakan organisasi perangkat daerah di kota Kudus. Alasan perbedaan dari objek ini disebabkan oleh fakta bahwa disetiap daerah tentunya pasti memiliki perspektif yang berbeda pada pelaporan keuangan yang dapat menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menilai akuntabilitas serta kinerja keuangan suatu entitas.

Berdasarkan penelitian diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal maka penelitian ini mengambil judul yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi (Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Kudus)”**.

## **1.2. Ruang Lingkup**

Faktor-faktor yang kompleks mempengaruhi penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian ini dibatasi dengan permasalahan yang dikaji, maka ruang lingkup penelitian ini ditunjukkan sebagai berikut:

1. Memiliki variabel independen yaitu sistem akuntansi keuangan daerah ( $X_1$ ),

kompetensi aparatur pemerintah ( $X_2$ ), pemanfaatan teknologi informasi ( $X_3$ ), kapasitas sumber daya manusia ( $X_4$ ), Variabel moderasi adalah sistem pengendalian internal ( $Z$ ).

2. Kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen.
3. Objek dari penelitian ini adalah organisasi perangkat daerah di kota Kudus.

### **1.3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan uraian latar belakang, penelitian ini yang akan membahas pengelolaan keuangan di Indonesia yang dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel. Ukuran akuntabilitas laporan keuangan dapat dilihat dari opini yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keamanan (BPK) RI. Dari hasil opini tersebut pemerintah kabupaten Kudus selalu menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian. Untuk mendapatkan opini tersebut pemerintah kabupaten Kudus harus tetap mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi aparatur pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi yang dapat mempengaruhi hubungan antar variabel dependen dan variabel independen. Permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Bagaimana pengaruh kompetensi aparatur pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan?

3. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Bagaimana pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan?
5. Bagaimana pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan yang dimoderasi sistem pengendalian internal?
6. Bagaimana pengaruh kompetensi aparatur pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan yang dimoderasi sistem pengendalian internal?
7. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan yang dimoderasi sistem pengendalian internal?
8. Bagaimana pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan yang dimoderasi sistem pengendalian internal?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini menganalisis komponen yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan pendekatan teori *stewardship*. Teori *stewardship* mengatakan bahwa ada hubungan yang jelas antara kesuksesan organisasi dan kepuasan pemilik. Tujuan dari penelitian ini adalah pemerintah hakikatnya dapat bertindak dengan penuh tanggung jawab, dapat dipercaya, berintegritas tinggi, dan memiliki kejujuran itulah tujuan dari penelitian ini. Diharapkan pengungkapan laporan keuangan yang baik akan menjadi motivasi pemerintah untuk memberikan informasi yang baik kepada organisasi. Diantara tujuan penelitian ini digunakan untuk menganalisis :

1. Untuk menganalisis pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap

kualitas laporan keuangan.

2. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Untuk menganalisis pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
5. Untuk menganalisis pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan yang dimoderasi sistem pengendalian internal.
6. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan yang dimoderasi sistem pengendalian internal.
7. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan yang dimoderasi sistem pengendalian internal.
8. Untuk menganalisis pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan yang dimoderasi sistem pengendalian internal.

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi penulis

Mampu menambah pengetahuan dibidang keuangan khususnya dibidang pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi aparatur pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi penelitian yang berkualitas sehingga mampu mereferensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi sempurna, serta dapat menambah pengetahuan para pembaca mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan menerapkan ilmu pengetahuan.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan nilai akuntabilitas serta kinerja keuangan apakah pengelolaan keuangan daerah sudah akuntabel atau belum. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mendeteksi tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah agar lebih berpartisipasi dalam mengawasi serta mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah.

4. Bagi pemerintah daerah

penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan koreksi dalam penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.